

JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN

Vol.6, No.2, 2021

DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11743



Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center

Vicky Alfitra Perdana¹, Ahmad Syafiqurrohman², Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro³, Nita Aribah Hanif⁴, Muhammad Miftahul Ahsan⁵, Rahmawati Husein⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dikirimkan: 16 Juli 2021

Direvisi: 29 September 2021

Diterbitkan: 30 September 2021

INTISARI

Pandemi Covid-19 sejak kemunculannya di tanah air terus memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang cukup ramai dari adanya aktivitas masyarakat baik itu masyarakat lokal maupun pendatang tentunya memiliki potensi untuk meluasnya paparan Virus Covid-19 ini lebih cepat. Hal ini tentunya membutuhkan suatu penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai sektor guna mempercepat penanganan ini seperti apa yang dilakukan oleh BPBD DIY dengan MCCC PWM DIY. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya peran NGO yaitu MCCC dengan BPBD DIY dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah D.I Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian berupa metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasilnya diketahui bahwa pola hubungan yang dilakukan antara kedua lembaga tersebut dilakukan melalui pembentukan posko dukungan yang sejatinya memiliki 3 fungsi utama yakni cipta kondisi, dekontaminasi dan pemulasaran jenazah Covid-19. Collaborative Governance antara MCCC PWM DIY dengan BPBD DIY menunjukkan intensitas yang baik dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Kesimpulan yang didapat bahwasannya pola kolaborasi yang dilakukan ini cenderung efektif mengingat penanganan lapangan membutuhkan suatu tindakan cepat dengan dukungan sumber daya yang mencukupi yang dipenuhi melalui interaksi antar sektor.

KATA KUNCI

Collaborative Governance, Pandemi Covid-19, Efektivitas

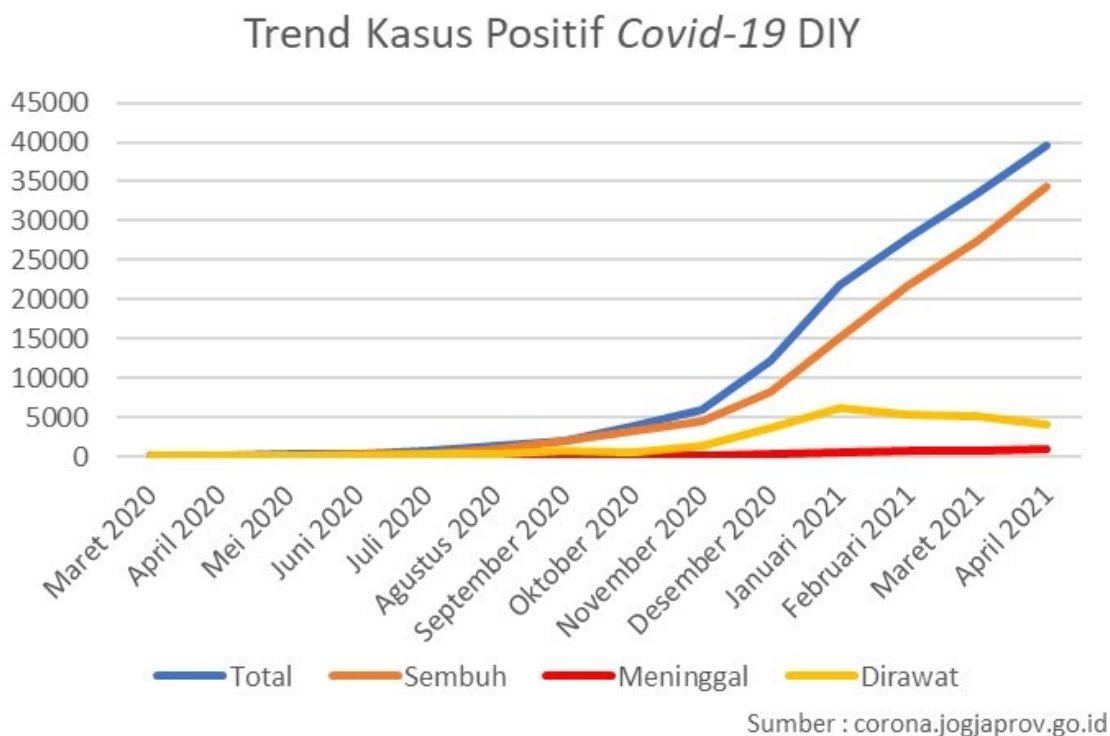
Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji tentang *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dalam upaya penanggulangan Covid-19 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasca ditemukannya positif Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, pemerintah pusat

melalui kebijakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam nasional. Untuk merespons Keppres tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberlakukan masa tanggap darurat Covid-19 selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 (Nugraheny, 2020).

Bersamaan dengan itu, Kementerian Kesehatan juga menerbitkan peraturan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini ditujukan kepada daerah yang berpotensi sebagai daerah dengan penularan virus sangat tinggi. Adapun faktor yang menentukan diterapkannya aturan PSBB berdasarkan dari peningkatan kasus positif secara signifikan dan banyaknya Orang Dalam Pengawasan (ODP) di daerah tersebut. Daerah yang pertama kali menerapkan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta, sementara Provinsi DIY baru menerapkan PSBB pada tahun 2021 melalui Intruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 Tentang Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Gambar 1. Trend Kasus Positif Covid-19 di DIY



Sumber: Corona.Jogjaprov.go.id, 2021

Data diatas menunjukkan bahwasannya kasus paparan Covid-19 di DIY meningkat pesat. Sejak Minggu, 8 November 2020 terdapat 4.237 kasus positif dan sekitar 714 orang yang sedang dirawat dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi DIY (PEMDA DIY, 2020). Data terbaru menunjukkan bahwasannya sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 terdapat 43.835 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi DIY (Pemda DIY, 2021). Hal ini merupakan konsekuensi dari “keterlambatan” pemberlakuan PSBB di DIY yang mengakibatkan daerah ini masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19 (Shalihah, 2021). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DIY perlu untuk melakukan

tindakan pencegahan secara cepat dan taktis meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengawasan, penyelamatan serta pemulihan korban Covid-19. Melalui tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY tersebut diharapkan dapat mengurangi secara drastis kasus penularan positif Covid-19.

Kasus positif yang semakin meningkat tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DIY untuk berupaya melakukan respon yang lebih aktif dan efektif. Namun, mengingat keterbatasan tangan pemerintah dalam menjangkau seluruh masyarakat di wilayahnya, pemerintah membutuhkan bantuan dari *stakeholders* lain salah satunya seperti sektor swasta dalam melakukan penanganan dengan cepat dan optimal (Pitri, 2017). Kondisi ini pun memantik salah satu organisasi masyarakat terbesar di DIY yaitu Persyarikatan Muhammadiyah untuk membentuk satuan khusus penanganan Covid-19 yang diberi nama *Muhammadiyah Covid-19 Command Center* (MCCC) (Fadel, 2020). Bentuk kepedulian dari Muhammadiyah terhadap pandemi Covid-19 yang menyebar secara luas mendorong berbagai tindakan penanganan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan menjadikan persyarikatan ini dianggap organisasi paling peduli Covid-19 berdasar survei masyarakat (Fakhrudin, 2021). Ditengah Keadaan yang cukup luar biasa ini mendorong MCCC dan Pemerintah DIY melalui BPBD berkolaborasi dan menciptakan tata kelola manajemen kebencanaan sebagai respon dari krisis Pandemi Covid-19 di Provinsi DIY.

Pola hubungan antara MCCC sebagai organisasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi DIY terkait penanganan Pandemi Covid-19 merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya peran NGO yaitu MCCC dengan BPBD DIY dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah D.I Yogyakarta. Penelitian ini akan bermanfaat untuk mendorong adanya *collaborative governance* antara Pemerintah DIY dan Muhammadiyah selaku salah satu organisasi masyarakat untuk berkolaborasi menanggulangi wabah Covid-19 di wilayah Provinsi DIY. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana manajemen *collaborative governance* dan memberikan penilaian terhadap efektifitasnya. Hal ini sesuai dengan visi besar dari SDGs yang mengutamakan adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang dilakukan secara partisipatif dalam memberikan pelayanan yang bersifat membangun untuk mencapai tujuan dan target dari SDGs, khususnya poin nomor 3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia (SDG's, 2017).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait peran *collaborative governance* dalam penanganan bencana seperti pada artikel jurnal dari (Majid, Muchin, & Sunariyanto, 2021) yang membahas mengenai bagaimana interelasi atau kerjasama antar kolaborasi *governance* dalam penanganan covid-19 di Malang. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwasanya dalam penanganan bencana covid-19 pemerintah memang membutuhkan bantuan dan kolaborasi yang terjalin dengan baik bersama *stakeholders* lain guna penangananan covid-19 yang lebih efektif. Dengan adanya kerjasama ini, maka akan meningkatkan daya pemerintah dalam melakukan penanggulangan covid-19 seiring bertambahnya kapasitas kemampuan dari bantuan masing-masing *stakeholders* tersebut (Machruf, Hermawan, & Meutia, 2020).

Kemudian menyangkut *collaborative governance* juga dikaji dalam penelitian (Agustina, 2018) yang menyatakan bahwa pemerintah perlu bersinergi dalam meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman bencana yang mungkin terjadi.

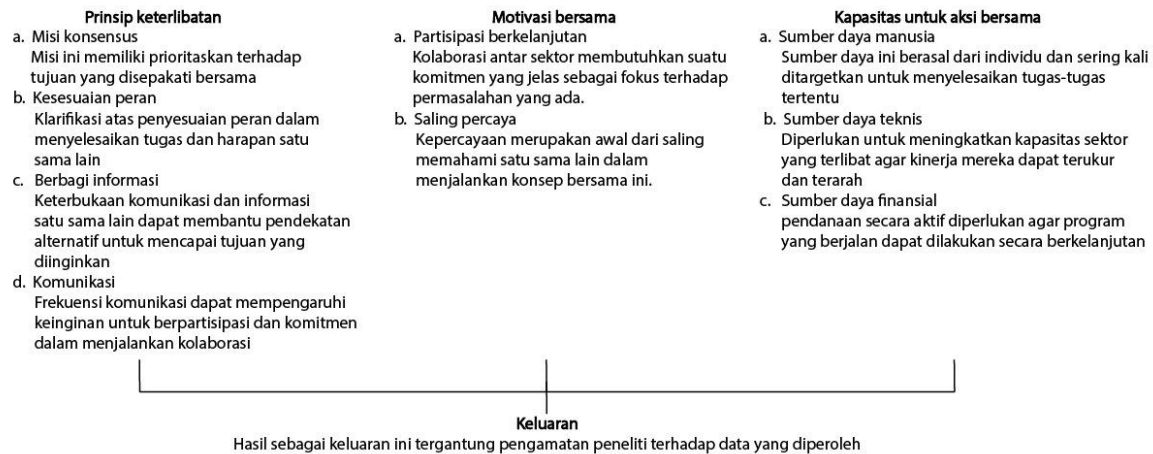
Penelitian dari (Mutiarawati & Sudarmo, 2017) juga turut membahas mengenai kolaborasi governance dalam penanganan suatu bencana, yaitu rob di Kota Pekalongan. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memang sangat membutuhkan bantuan stakeholders dengan komitmen dan sinergi yang baik serta saling mengisi satu dengan yang lain agar dapat menanggulangi bencana dengan optimal. Penelitian yang sama pun dibahas dalam kajian (Bustari, Laksono, & Hasanbasri, 2018) yang menyatakan sinergitas yang baik sangat perlu dilakukan mengingat banyaknya urusan pemerintah yang menjadikannya memiliki keterbatasan apabila harus bergerak sendiri salah satunya dalam penanggulangan bencana. Penelitian (Suarjat, 2017) ini dapat dilihat bahwa pentingnya jalinan Kerjasama yang baik dengan kejelasan status yang mungkin memengaruhi peran serta bentuk sinergi yang dilakukan guna mengefektifkan penanggulangan bencana. Konsep ini pun diperkuat dengan penelitian (Pratikno & Kurniadi, 2020) yang menunjukkan bahwa Kerjasama yang baik akan sangat mempengaruhi hasil dan upaya dari penanggulangan bencana itu sendiri. Kurangnya efektivitas dalam sebuah *collaborative governance* ini merupakan salah satu sumber utama dalam permasalahan kurang optimalnya suatu penanganan masalah atau bencana sehingga upaya tersebut belum berjalan dengan semestinya sebagaimana yang ditujukan, yang mana pernyataan ini disebutkan dalam penelitian (Rusmanto, N. U. P, 2018) dan penelitian (Darwati, samad, & Wekke, 2019).

Fakta ini pun memperkuat dasar dari penelitian ini bahwa kerjasama dalam penanggulangan bencana sangat perlu dilakukan mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan anggaran dari pemerintah. Penelitian terdahulu hanya fokus pada aspek efektivitasnya, padahal tata kelola *collaborative governance* perlu juga dibahas dalam konteks penanganan kebencanaan. Hal ini dikarenakan tata kelola atau manajemen kebencanaan juga perlu ditinjau untuk menilai bagaimana pola kolaborasi dapat berjalan. Tentunya sangat selaras dengan tujuan penelitian ini yang mana akan menilai efektivitas melalui manajemen kolaborasi yang dilakukan sehingga mendapatkan informasi yang cukup rinci dari permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian studi kasus yang digunakan yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang cukup rawan akan kasus peningkatan Covid-19 sekaligus merupakan kota wisata dan kota pelajar yang mana cukup ramai didatangi oleh pendatang baik itu wisatawan maupun pelajar yang datang dari luar daerah. Mengingat wilayah Provinsi DIY yang terlalu luas dan banyaknya penduduk yang ada membuat suatu keterbatasan dalam penanganan sehingga kerjasama antar pihak pemerintah dengan stakeholders seperti salah satunya dari pihak swasta sangatlah dibutuhkan. Hal inilah yang akan menjadi fokus yang menarik untuk dikaji mengingat saat ini Indonesia tengah dilanda wabah Covid-19, tak terkecuali Provinsi DIY yang hingga saat ini belum menemui tanda-tanda berakhirnya pandemi. Tentunya menurut peneliti sangat menarik untuk menilai bagaimana dilematika penanganan Covid-19 di DIY ini dikarenakan dari segi kondisi yang ada. Banyak kajian *collaborative governance* hanya memahami efektivitas, padahal Pola manajemen kolaborasi serta intensitasnya juga perlu untuk dikaji.

Maka dari itu, peneliti mencoba mengkaji pola hubungan antar pemangku kepentingan dalam collaborative governance dalam penanggulangan COVID-19 di DIY dan mengkaji tentang tata kelolanya, kemudian hasil yang diperoleh akan kembali dinilai tentang efektivitas kolaborasi tersebut. Mengacu pada (Irawan Denny, 2017), konsep

collaborative governance adalah kerja sama antar pemangku kepentingan (dalam konteks penelitian ini adalah swasta) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan suatu upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Istilah kerja sama ini dapat melibatkan antar pemangku kepentingan yang berkaitan seperti pemerintah, swasta, serta masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan indikator tersebut sebagai bahan acuan dalam mengambil data. Nantinya data yang sudah diperoleh akan di uji

Bagan 1. Prinsip-Prinsip dalam Kolaborasi



Sumber: Margerum, 2008

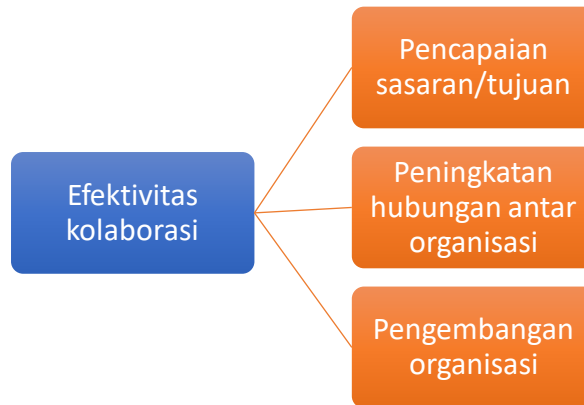
Peneliti mencoba mengkaji pola hubungan antar pemangku kepentingan menggunakan pengukuran dari (Margerum, 2008), yang mencakup prinsip keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi bersama menggunakan indikator teori efektivitas kolaborasi agar mendapatkan suatu kesimpulan yang memberikan pemahaman terkait pola kolaborasi dalam penanganan bencana pandemi ini. Beni Pekei (2016:69-70) dalam (Sunarmin, Utami and Yulianita, 2019) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan yang dilakukan pemerintah sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah rendahnya dan waktu secepat cepatnya. Adapun faktor penentu dari efektivitas yaitu sebagai berikut :

- a.) Faktor Sumber Daya Manusia, seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan,
- b.) Faktor Struktur Organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu structural maupun fungsional,
- c.) Faktor Teknologi Pelaksanaan Pekerjaan,
- d.) Faktor Dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat,
- e.) Faktor Pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam satu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Adapun indikator efektivitas kolaborasi menurut Gray dalam (Eprilianto,

Pradana, & Sari, 2020) yaitu : 1.) Pencapaian sasaran/tujuan 2.) Peningkatan hubungan antar organisasi 3.) Pengembangan organisasi.

Gambar 2. Teori Efektivitas Kolaborasi



Sumber: Gray dalam Eprilianto dkk, 2020 (Olahan pribadi, 2021).

Setelah mendapatkan kesimpulan dari teori efektivitas tersebut, nantinya akan diolah sebagai informasi yang sudah siap untuk dijadikan pembahasan penelitian ini. Kedua hubungan stakeholder dan efektivitas ini dianggap sangat penting agar dapat mendapatkan kesimpulan dari permasalahan ini. Kemudian, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian berupa metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian, data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama*, data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam akan dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Di samping itu, wawancara juga dilakukan *via* telepon dan *chatting* dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* terhadap informan-informan yang dianggap perlu untuk dilakukan wawancara lebih mendalam. Adapun yang menjadi target narasumber dalam penelitian yaitu aparatur dari Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mana dalam menangani hal ini dilimpahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua *Muhammadiyah Covid-19 Command Center* (MCCC) Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, data sekunder didapatkan dengan cara *desk study* terhadap kajian-kajian terdahulu yang memiliki kesamaan topik tentang penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi DIY ini. Selain itu, data sekunder juga berupa dokumen, arsip, video, foto dan laporan-laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data-data yang didapatkan kemudian dianalisa dengan menggunakan *interactive model*. Data akan dibagi ke dalam tiga tahap analisa yaitu melakukan reduksi data untuk tetap berada pada fokus penelitian, melakukan *display* data untuk menyajikan data secara deskriptif, terakhir menganalisa secara komprehensif untuk menarik kesimpulan atas kolaborasi dua instansi yang diteliti ini.

Determinasi Kolaborasi antara MCCC PWM DIY dengan BPBD DIY

Keterbatasan tangan pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah dalam penanggulangan suatu bencana melatarbelakangi pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti dari unsur stakeholders, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan dijelaskan pula dalam penelitian (Agustina, 2018) dan (Isngadi & Khakim, 2021). Dalam hal ini salah satu stakeholders yang dirangkul oleh BPBD DIY adalah Muhammadiyah. Seperti yang diketahui, Muhammadiyah melalui MDMC merespon dengan cepat adanya situasi pandemi ini yakni dengan membentuk sebuah lembaga *ad hoc* yang dinamakan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC). MCCC merupakan realisasi dari penugasan PP Muhammadiyah supaya terjalin koordinasi antar Majelis (Falahuddin, 2020). MCCC sendiri didirikan berdasarkan Surat Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 02/MLM/1.0/H/2020 Tentang Wabah Covid-19. Meskipun dalam jalinan Kerjasama antara MCCC dan BPBD ini tidak didasarkan pada perjanjian tertulis hitam di atas putih sebagaimana perjanjian MoU yang biasanya dilakukan oleh kerjasama lainnya, namun dalam praktik lapangan kerjasama ini berjalan dengan lancar yang berorientasi pada kesamaan misi konsensus.

Kerjasama tanpa perjanjian formal ini dapat saja dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian (Mutiarawati & Sudarmo, 2017) yang menyebutkan bahwa hubungan collaborative governance dapat berjalan atas dasar perjanjian formal maupun informal. Dalam Kerjasama dengan perjanjian formal memang dapat dengan mudah mendeskripsikan prosedur maupun pembagian tugas dalam partisipasinya, namun beda kasusnya apabila perjanjian collaborative governance tersebut dilakukan dalam hal kebencanaan maka akan lebih tepat dilakukan kolaboratif informal dikarenakan kerjasama tersebut bersifat tidak terduga dan momentum. Menurut (Majid et al., 2021) menyatakan bahwasannya kolaborasi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang memiliki kesamaan tujuan dan saling memberi manfaat satu dengan yang lain yang didasari pada kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan kolaborasi yang dilakukan oleh MCCC PWM dan BPBD DIY dalam memerangi pandemi Covid-19.

Narasumber dari perwakilan MCCC maupun BPBD menyatakan bahwa kerjasama diantara keduanya diawali dengan tergabungnya dalam satu wadah yang dikomandoi oleh BPBD yang disebut dengan posko dukungan atau posduk untuk saling mengisi dan melengkapi dari segi kontribusi SDM relawan Covid-19 hingga fasilitas pendukung lain seperti peralatan dan armada penunjang. Di posduk yang terletak di Markas Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DIY inilah keduanya saling melibatkan diri dalam setiap upaya penanggulangan Covid-19 dari mulai penyediaan shelter, dekontaminasi, pemulasaran, hingga cipta kondisi. Kemudian menurut (Margono, Masithoh, & Priyo, 2020) dan (Ichsan, 2020), MCCC juga membantu BPBD dalam penyediaan rumah sakit rujukan covid-19 yang disiagakan dari rumah sakit kepemilikan Muhammadiyah seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah (RSMA) sebanyak 77 rumah sakit yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali DIY. Partisipasi yang diberikan oleh MCCC ini juga merupakan salah satu wujud dari adanya kesadaran akan rasa kepedulian terhadap misi kemanusiaan yang menjadi komitmen tersendiri bagi Muhammadiyah (Falahuddin, 2020).

Meskipun posduk telah resmi ditutup pada 1 Maret 2021 sebagaimana yang diakui oleh narasumber dari BPBD namun kerjasama antara BPBD dan MCCC PWM DIY masih terjalin dengan baik hingga kini. Hal inipun dibuktikan dengan masih adanya kolaborasi dan Kerjasama untuk saling mengisi satu sama lain apabila terdapat keterbatasan sumber daya pendukung penanggulangan Covid-19, baik dari pihak BPBD maupun MCCC. Pernyataan ini juga ditegaskan oleh pihak MCCC maupun BPBD yang masih saling mem-back up dalam hal kebutuhan SDM relawan, persediaan alat sarana prasarana, persediaan RS rujukan hingga persediaan armada seperti ambulan. Sebagaimana kontribusi MCCC tersebut juga sempat dibahas dalam penelitian (Safri'ah, 2020). Kerjasama berkelanjutan dan saling memberi partisipasi ini dilatarbelakangi oleh adanya rasa saling percaya dan kesadaran saling membutuhkan diantara keduanya. Pentingnya kepercayaan yang terbangun dalam sebuah kolaborasi berdasarkan pengalaman yang pernah dilewati keduanya menjadi salah satu modal dalam terbentuknya kolaborasi yang berjalan dengan baik. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat memantik kolaborasi yang dilakukan agar menjadi kerjasama berkelanjutan dari masa ke masa, sebagaimana konteks saling percaya ini sempat dijelaskan dalam (Pratikno & Kurniadi, 2020). Hal ini juga diperkuat oleh (Setiawan, 2019) yang menyatakan bahwa suatu kepercayaan nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Purwadi selaku ketua MCCC PWM DIY, menjelaskan bahwasannya diantara kedua lembaga ini tingkat kepercayaan yang telah terbangun begitu kuat. Hal tersebut disebabkan karena kedua lembaga telah memiliki kedekatan secara emosional yang membuat tingkat kepercayaan kedua lembaga tersebut begitu tinggi hingga tidak perlu menggunakan langkah yang prosedural maupun birokratis dalam melakukan kerjasama yang dijalankan. Bahkan dalam kolaborasi ini tidak ada pembagian tugas secara khusus yang mengatur terkait dengan peran masing-masing lembaga sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kerjasama pada umumnya. Dikarenakan bentuk kerjasama ini tidak didasari oleh MoU, akan tetapi misi saling membantu diantara keduanya tetap berjalan berjalan dengan baik. Hal ini pun sangat bertolak belakang dengan penelitian (Musta, Billah, & Mustofa, 2018) yang menyatakan bahwa setiap lembaga memiliki perannya masing-masing yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Uphoff (2000) dalam (Anen, 2016) yang menyatakan bahwa tanpa peran dan aturan dalam pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya, maka tindakan kolektif menjadi cenderung sulit dilakukan.

Dinamika Komunikasi dan Pembagian Informasi dalam Collaborative Governance

Komunikasi memiliki peran penting (important role) bagi pengelolaan kelembagaan ataupun pengorganisasian terutama ditengah situasi darurat kebencanaan (Sampurno, Kusumandyoko, & Islam, 2020). Hal tersebut dikarenakan dengan adanya komunikasi yang berjalan baik antar kedua belah pihak (dalam hal ini BPBD dan MCCC) maka proses untuk mencapai tujuan bersama akan lebih mudah digapai (Mulyono, Elshap, & Kartika, 2018). Ditengah situasi krisis Pandemi Covid-19 kolaborasi antar kelembagaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan salah satunya

adalah untuk mencapai efektivitas dalam penanganan kebencanaan. Komunikasi antar-pemangku kepentingan dapat berperan penting dalam sistem penanganan karena tingkat efektivitasnya tergantung pada bagaimana kapasitas sektor yang terlibat untuk segera menanggapi pesan (Badri, Lubis, Susanto, & Suharjito, 2018). Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi antar lembaga adalah dengan dibentuknya Posko Dukungan (Posduk). Posduk merupakan sebuah wadah yang menampung berbagai macam lembaga penanganan Covid-19 di Provinsi DIY salah satunya adalah MCCC PWM DIY. Fungsi dibentuknya Posduk berkaitan dengan evakuasi serta pemakaman jenazah Covid-19 yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak agar penanganan dapat berjalan dengan lancar.

Komunikasi serta koordinasi terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 pada level provinsi dilakukan dengan wadah terpusat yaitu melalui posko dukungan (Posduk) dengan BPBD selaku fasilitator kegiatan ini. Menariknya, pola komunikasi yang dilakukan antara BPBD dengan MCCC terkait respon kebencanaan pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara non-formal yakni melalui sosial media seperti whatsapp group (WAG). Endro, Relawan BPBD DIY menuturkan bahwasannya “kalo yang distributifnya sama, dari DIY kan unsur-unsurnya sama mba, bisa lewat media social, dalam tanda kutip WA, bisa lewat komunikasi HT itu bisa” (wawancara Juni 2021). Hal tersebut senada dengan pernyataan Purwadi, Ketua MCCC PWM DIY bahwasannya “Komunikasinya ya itu tadi ya berangkat itu tadi antara mccc dengan bpbd itu hubungannya secara emosional sudah sangat dekat” (wawancara Juni 2021). Koordinasi serta pola komunikasi yang dilakukan antara BPBD dengan MCCC atau lembaga lain yang termasuk didalam Posko Dukungan (Posduk) bisa dilakukan dengan menggunakan WAG.

Bentuk lain koordinasi yang dilakukan adalah melalui perangkat HT yang digunakan untuk memonitoring relawan yang sedang menjalankan tugas. Walaupun pola komunikasi dilakukan sebagian besar secara non-formal dan insidental tetapi miss komunikasi yang terjadi antara BPBD dengan MCCC tergolong nihil. “sepengetahuan saya begitu selama ini belum ada informasi dari temen-temen relawan di lapangan itu miss komunikasi begitu ya” Ujar Purwadi (wawancara Juni 2021). Meski menggunakan pola koordinasi yang tidak formal BPBD selaku pemegang komando tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh anggota Posduk. Rentang dilakukannya Monitoring dan Evaluasi seringkali dilakukan antara 2-3 bulan sekali untuk memantau kinerja dan kemajuan kolaborasi antar lembaga khususnya MCCC.

Keterlibatan dalam penanganan Covid-19 memerlukan keterbukaan informasi antara MCCC dan BPBD DIY agar terciptanya kesinambungan informasi. Apabila kedua lembaga menjalin sebuah koordinasi maka keterbukaan informasi dalam hal penanganan Pandemi menjadi sangat penting untuk dilakukan (Supriadi, 2017). KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) menuturkan dalam wawancaranya pentingnya untuk memberikan keterbukaan informasi publik ataupun organisasi ditengah Pandemi Covid-19 diantaranya: a) Optimalisasi hak masyarakat atas informasi publik, b) Menciptakan good governance dan c) Mendorong peran aktif masyarakat terkait kebijakan publik (Ninditya, 2021). Sebagai organisasi yang bergerak di bidang penanganan Pandemi Covid-19 MCCC dan BPBD DIY berfungsi untuk membantu peran serta aktif pemerintah terutama pada fase tanggap darurat seperti saat ini. BPBD DIY dan MCCC melakukan penanganan tidak hanya terkait dengan

penanganan secara teknis tetapi juga berfungsi untuk memberikan kebenaran informasi melalui diseminasi informasi yang diberikan kepada masyarakat (Bafadhal & Santoso, 2020).

Keterbukaan informasi serta keterlibatan aktif kedua lembaga dalam mengelola informasi secara kredibel sebelum diedarkan kepada masyarakat menjadi prasyarat wajib yang baik melalui media sosial ataupun media massa (Musaffak & Setiawan, 2020). Melalui hasil pengamatan di lapangan dan hasil olah data wawancara, pola pembagian informasi antara MCCC dan BPBD dapat dikategorikan menjadi 2 hal yakni Informasi Internal (antar lembaga) dan Informasi Eksternal (Masyarakat). Informasi internal dapat berupa: Pertama, ketersediaan armada ambulance guna pemakaman Covid-19 dan penjemputan pasien Covid-19 menuju Rumah Sakit; Kedua, Pembagian informasi terkait ketersediaan personil pemakaman pasien meninggal akibat Covid-19 dan; Ketiga, Ketersediaan shelter yang dikoordinasikan antara BPBD dan MCCC. Ketiga hal tersebut merupakan bentuk pembagian informasi yang sering dilakukan antara MCCC dengan BPBD terutama dalam merespons pelonjakan kasus Pandemi Covid-19 di Provinsi DIY. Pembagian informasi tersebut dikomunikasikan melalui media seperti whatsapp group.

Pertama, terkait dengan armada yang dimiliki oleh MCCC PWM DIY guna pemakaman covid-19 secara kuantitas memang tersebar di media sosial. Terdapat armada Ambulance yang penggunaannya tidak hanya dikhususkan bagi masyarakat Muhammadiyah melainkan bagi siapa saja yang membutuhkan baik itu melalui BPBD DIY ataupun masyarakat yang menghubungi secara langsung melalui nomor darurat yang disediakan. Kedua, pelaksanaan pemulasaran jenazah Covid-19 tidak bisa sepenuhnya diserahkan hanya kepada tenaga kesehatan melainkan perlunya dikolaborasikan dengan pihak-pihak swasta seperti MCCC. Dalam pelaksanaannya, BPBD DIY seringkali mendapatkan permintaan bantuan dari Rumah Sakit di seluruh Provinsi DIY. Dikarenakan keterbatasan SDM serta armada maka BPBD DIY berkolaborasi dalam hal pembagian relawan hingga peminjaman Armada Ambulance.

Ketiga, Informasi terkait shelter menjadi hal yang sangat penting untuk dikomunikasikan. Apabila BPBD mendapatkan laporan terkait penuhnya bangsal pada RS pemerintah maka MCCC menawarkan bantuannya dengan memberikan daftar shelter yang tersedia. Terdapat 5 Shelter yang dimiliki oleh MCCC PWM diantaranya UNISA (Daya tampung 78), UMY (Daya tampung 35), GOSE (Daya tampung 27), UAD (Daya tampung 96) dan PPA (Daya tampung 42) (Mucovid19, 2021a). Pembagian informasi terkait shelter di MCCC dikerjasamakan dengan berbagai lembaga penanganan Covid-19 yang tergabung didalam Posduk yang dikomandoi oleh BPBD. Apabila terdapat pasien positif Covid-19 yang memiliki gejala berat maka Dinas Sosial selaku pengelola shelter milik pemerintah akan mengkonfirmasi penempatan pasien tersebut dan jika RS milik Pemerintah tidak tersedia maka akan dikonfirmasi ulang kepada shelter milik Muhammadiyah (yang dikoordinasikan oleh MCCC) terkait ketersediaan ruangan mulai dari bangsal, ICU ataupun IGD.

Tabel 1. Daftar Media Diseminasi Informasi BPBD dan MCCC

Media Diseminasi Informasi		
Media Sosial/Media Massa	BPBD	MCCC
Website	http://bpbd.jogjaprovo.go.id/covid-19	https://covid19.muhammadiyah.id/
Instagram	@Bpbd_diy	@Mucovid19
Facebook	Pusdalopsbpbd diy	Mucovid2019
Twitter	Pusdalops_diy	Mucovid19

Sumber; Berbagai Sumber (Olahan Penulis, 2021)

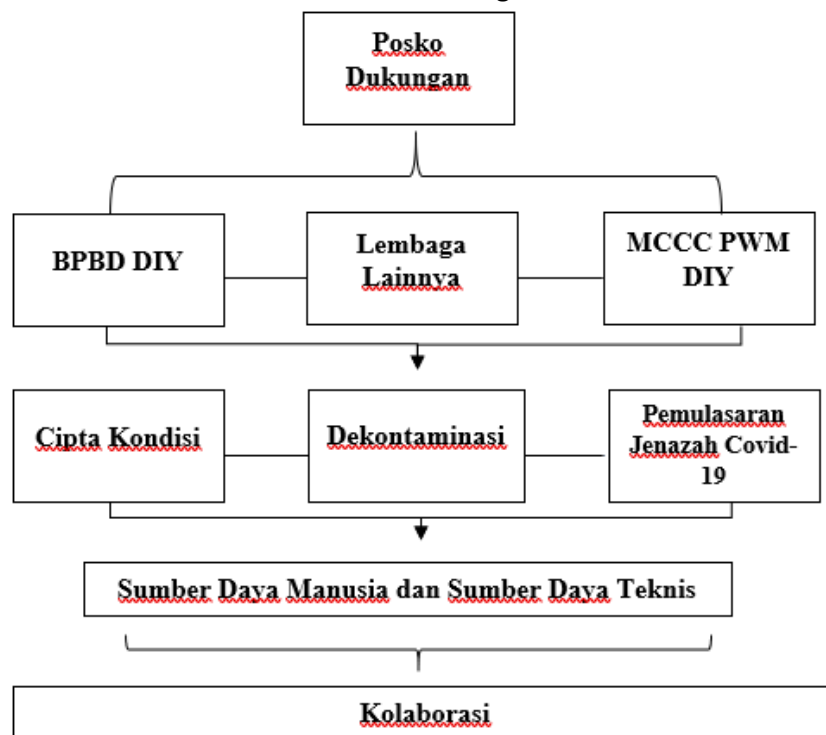
Pembagian informasi secara eksternal antara MCCC dan BPBD DIY mencakup beberapa hal seperti diseminasi informasi, Call Center Covid-19 dan lain sebagainya. Diseminasi Informasi merupakan penyebaran informasi secara valid kepada kelompok sasaran atau masyarakat tujuan sesuai dengan kasus atau problematika yang sedang berkembang di masyarakat (Rodiah, Budiono, & Rohman, 2018). Dari berbagai macam kanal sosial media dan media massa seperti pada **Tabel 1** tersebut diharapkan informasi yang diberikan setelah melalui penjangkaran informasi yang ketat akan menciptakan informasi yang komunikatif serta mampu melawan arus Informasi *hoax* yang tersebar di media sosial maupun media massa terkait dengan Pandemi Covid-19 (Michael, 2020). Namun, strategi yang lain juga perlu diterapkan seperti bekerjasama dengan media nasional ataupun lokal agar memperkuat jejaring publik sehingga informasi dapat tersebar tidak hanya dalam lingkup regional tetapi hingga level nasional (Subekti, Hafiar, & Bakti, 2020). Kemudian, untuk mengurangi kecemasan berlebih masyarakat terkait informasi Covid-19 yang tersebar maka MCCC memberikan layanan *Call Center* yang terdiri dari layanan konsultasi kesehatan, layanan konsultasi agama dan layanan dukungan psikososial (Mucovid19, 2021).

Membangun Kekuatan Bersama dalam lingkup Kolaborasi

Keterlibatan stakeholder dalam suatu penanganan bersama terjalin melalui pola kolaborasi. Dalam melakukan suatu kolaborasi, pengembangan organisasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar dapat terus bergerak dalam mencapai tujuan bersama (Abidin, Firdaus, & Syed, 2021). Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pun juga merupakan hal yang strategis untuk dilakukan dalam pengembangan organisasi dikarenakan SDM merupakan kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja suatu organisasi (Mistriani, Maria, & Damayanti, 2020). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY selaku fasilitator dalam kegiatan kolaborasi ini perlu mengkoordinir setiap sektor yang ada melalui wadah berupa pos dukungan serta Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PWM DIY sebagai swasta yang turut bergabung dalam kolaborasi ini perlu untuk menunjang setiap kebutuhan di dalam posduk. Meski bukan suatu kewajiban bagi MCCC untuk memberikan aspek pendukung secara penuh namun lembaga ini siap melakukan hal yang dibutuhkan secara kerelawanan.

BPBD selaku komando utama dalam Posduk memberikan penawaran terhadap seluruh lembaga yang tergabung dalam Posduk yang berkaitan terkait kesiapan SDM ataupun Armada sebelum melakukan responsi. Hal tersebut dilakukan agar penanganan dapat tetap terstruktur dan terarah mengingat setiap Tim yang selesai melaksanakan penugasan baik itu cipta kondisi, dekontaminasi, pemulasaran dan penghantaran wajib untuk istirahat selama 1x24 Jam. Dikarenakan setiap tim hanya diperbolehkan melakukan satu kali pemulasaran disetiap harinya maka diperlukannya SDM yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan pemulasaran. Oleh karena itu, perekrutan tenaga posduk tidak dilakukan secara bebas melainkan terdapat beberapa syarat diantaranya: 1) Pengalaman yang mumpuni, 2) Maksimal berumur 50 tahun, 3) sehat jasmani dan rohani, 4) Rekomendasi dari lembaga penanganan Covid-19 yang tergabung dalam Posduk. Setelah dilakukan proses rekrutmen SDM maka dilakukanlah Bimbingan Teknis (BIMTEK) agar setiap calon relawan mampu melaksanakan tugas secara maksimal.

Bagan 2. Pola Kolaborasi antara BPBD BIY dengan MCCC PWM DIY dalam Posduk



Sumber: Berbagai Sumber (Olahan Pribadi, 2021).

Pola kolaborasi antara BPBD dengan MCCC didalam Posko Dukungan sejatinya memiliki 3 fungsi utama yakni Cipta Kondisi, Dekontaminasi dan Pemulasaran jenazah Covid-19. Ketiga hal tersebut berjalan lancar dari awal dibentuknya Posko Dukungan ini pada tahun 2020. Berjalannya waktu, kebutuhan akan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 kian dibutuhkan seiring dengan melonjaknya kasus positif Covid-19. Hal tersebut mendorong kinerja yang sigap dari Posduk yang tergabung didalamnya berbagai macam lembaga penanganan Covid-19 dan salah satunya adalah MCCC. Ketersediaan Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Teknis (SDT) seperti relawan

pemulasaran jenazah, Ambulan serta APD menjadi kunci pokok berjalannya posko dukungan Provinsi DIY. Oleh karenanya, untuk menciptakan kesinambungan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain maka dibutuhkanlah collaborative governance dalam pemenuhan kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19 baik itu secara SDM ataupun SDT.

MCCC PWM DIY masih memiliki keterbatasan dalam hal kepemilikan ambulan karena beragam klasifikasi yang harus dipenuhi sehingga peralatan dan standar yang dimiliki oleh ambulan dari MCCC PWM DIY belum setara dengan yang ada di rumah sakit pada umumnya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua MCCC PWM DIY Bapak Purwadi yang menyampaikan bahwa, “Eeee, ambulan yang membawa pasien ringan, dengan ambulan yang membawa pasien ee emergence, itu berbeda. Nah, maka, ee dari 40 itu, yang kita siapkan untuk covid ini sekitar 8 armada”. Dari pernyataan tersebut membuktikan minimnya sumber daya ambulans yang dimiliki oleh MCCC PWM DIY yang hanya 8 buah saja. Namun yang terpenting dalam masa penanggulangan pandemi covid-19 ini adalah ambulans yang dimiliki oleh MCCC mampu untuk mengantarkan pasien baik warga Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah ke rumah sakit saat diminta pertolongan dari BPBD Provinsi DIY. Hal ini juga didorong dengan adanya prinsip kolaborasi yang menjadi pedoman dan semangat utama dari gerak BPBD DIY maupun MCCC PWM DIY.

Armada BPBD yang dapat berguna untuk mendukung jalannya penghantaran pemakaman dengan prosedur protokol covid-19 kepada pihak swasta yang membutuhkan atau malah sebaliknya. Mengingat kondisi perkembangan pandemi Covid-19 yang masih belum mereda membuat setiap sektor perlu saling mendukung agar tercapainya penanganan yang baik seperti halnya ketika rumah sakit yang memerlukan armada ambulan maka bisa berkoordinasi dengan tim yang ada di BPBD terlebih dahulu. Dalam penggunaan ambulan sendiri, setiap setelah melakukan pemakaman, maka armada tersebut perlu melalui prosedur protokol covid-19 dengan pengistirahatan armada selama 1x12 jam untuk selanjutnya dapat melaksanakan tugas kembali.

Selain pemenuhan teknis ambulan, hal lain yang perlu dipersiapkan yaitu ketersediaan alat pelindung diri (APD) untuk setiap tim yang akan bertugas. Petugas perlu mengikuti protokol yang mengharuskan menggunakan APD lengkap kostum lengan panjang sekali pakai dan kedap air, sarung tangan nonsteril dan sarung tangan yang menutupi manset kostum, pelindung wajah atau kacamata untuk mengantisipasi adanya percikan cairan tubuh, masker bedah, dan sepatu tertutup dengan shoes cover yang mana dapat melindungi petugas dari paparan virus yang cukup berbahaya ini (Pribadi, Kasetyaningsih, Julaeha, Nurcahyati, & Fajrin, 2021). Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut seperti APD maupun persediaan dekontaminasi, BPBD sebagai fasilitator posduk melakukan pengajuan pemenuhan kebutuhan ke pemerintah. Walaupun kolaborasi didalam posduk ini tidak terdapat pemenuhan kebutuhan secara finansial, tetapi pemenuhan barang siap pakai tersebut diakomodir secara langsung oleh masing-masing sektor dalam bentuk barang fisik. Sehingga, setiap sektor didalam posduk ini saling mendukung dalam hal teknis agar kegiatan penanganan dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan bersama.

Penutup

Collaborative governance antar lembaga ditengah pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan melalui adanya manajemen tata kelola kebencanaan yang saling bekerjasama antara sektor pemerintah dengan swasta maka diharapkan dapat menciptakan pola penanganan yang maksimal. Hal tersebut yang menjadi fokus dalam penelitian kami yakni mengkaji terkait kolaborasi antara BPBD DIY dengan MCCC PWM DIY terkait penanganan pandemi covid-19 di Provinsi DIY. Walaupun kolaborasi yang tercipta tidak berdasarkan skema kerjasama yang formal seperti pembentukan MoU tetapi manajemen kebencanaan yang dibangun oleh kedua lembaga tersebut sangat maksimal. hal ini dapat kita lihat secara langsung melalui pola kolaborasi yang terbangun didalam satuan Posko Dukungan (Posduk) dimana atara BPBD DIY dan MCCC PWM DIY saling bahu-membahu dalam menangani pandemi Covid-19 di Provinsi DIY.

Posko Dukungan dikomandoi secara langsung oleh BPBD DIY dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi DIY salah satunya adalah MCCC. Secara khusus, Posduk memiliki beberapa fungsi yakni dekontaminasi, Cipta Kondisi dan Pemulasaran Jenazah Covid-19. Dalam penelitian ini, kami mendapatkan beberapa hal diantaranya kolaborasi yang dilakukan antara MCCC dan BPBD terbangun melalui rasa saling percaya antara kedua lembaga dikarenakan tensi kolaborasi antara kedua lembaga tersebut sudah tinggi bukan hanya dalam penanganan pandemi yang notabene adalah bencana non-alam melainkan bencana-bencana lainnya. Oleh karena itu, Fondasi kolaborasi antara MCCC PWM DIY dan BPBD DIY sejatinya sudah terbangun melalui kerjasama-kerjasama dalam penanganan kebencanaan sebelum-sebelumnya.

Komunikasi serta pembagian informasi didalam kolaborasi antara lembaga BPBD DIY dan MCCC PWM DIY menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang baik dan lancar antara kedua lembaga maka akan memberikan kolaborasi yang maksimal pula. Beberapa diantaranya dilakukan melalui metode non-formal (tidak memakai surat, MoU dan bentuk formal lainnya) yakni melalui *whatsapp group* (WAG) Posko Dukungan. Beberapa kebutuhan yang dibagikan antara BPBD dan MCCC seperti pembagian Informasi Ambulance bagi pemulasaran Covid-19, ketersediaan Rumah Sakit dan perkembangan Positif Covid-19 di Wilayah DIY. Pembagian informasi serta komunikasi seperti yang disebutkan diatas menunjukkan hasil yang baik dengan tidak adanya miss komunikasi dalam pelaksanaan responsi di lapangan sesuai dengan pendapat dari kedua narasumber baik itu dari BPBD dan MCCC PWM DIY.

Pelaksanaan penanganan Pandemi covid-19 tentu membutuhkan pemenuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Teknis. Beberapa pemenuhan SDM yang dilakukan antara BPBD dan MCCC PWM DIY dilaksanakan sebagian besar terkait dengan pemulasaran Jenazah Pandemi Covid-19. Disisi lain, kolaborasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Teknis dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya adalah pemenuhan armada ambulans dan Pemenuhan APD dalam melaksanakan responsi di lapangan. Kedua hal tersebut dilaksanakan dengan landasan kolaborasi dan manajemen kerjasama yang baik dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Dengan berbagai macam penemuan tersebut maka kolaborasi antara MCCC PWM DIY dengan BPBD DIY dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Walaupun terdapat

beberapa kekurangan dalam melaksanakan penanganan secara bersama tetapi tidak mengurangi esensi dari kolaborasi yang terbangun dengan baik antara MCCC PWM DIY dan BPBD DIY dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi DIY.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi khususnya Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan terhadap program ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY yang telah memberikan dukungan terhadap program ini, serta narasumber yang berkenan untuk memberikan diwawancarai dalam penelitian ini.

Pendanaan

Kegiatan ini didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Republik Indonesia melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2021.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. bin Z., Firdaus, A., & Syed, M. A. M. (2021). Komunikasi Strategik dalam Pengurusan Organisasi. *Jurnal Pengajian Media* Retrieved from <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JPM/article/view/27880>
- Agustina, D. (2018). Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Fprb) Diy Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 87–103. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.87>
- Anen, N. (2016). Peran Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Kelurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 16(2), 72–81.
- Badri, M., Lubis, D. P., Susanto, D., & Suharjito, D. (2018). Sistem Komunikasi Peringatan Dini Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v19i1.1266>
- Bafadhal, O. M., & Santoso, A. D. (2020). Memetakan Pesan Hoaks Berita Covid 19 Indonesia Lintas Kategori, Sumber dan Jenis Disinformasi. 6(2), 235–249.
- Bustari, A., Laksono, T., & Hasanbasri, M. (2018). Kolaborasi lintas sektoral dalam kesiapsiagaan bencana banjir studi kasus di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Online Keperawatan Indonesia*, 1(1), 42–64.
- Darwati, D., samad, muhammad ahsan, & Wekke, I. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Integrated Community Shelter Pasca Bencana di Kota Palu. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7kjte>
- DIY, Pemda. (2021). Data Covid-19. Retrieved from corona.jogjapro.go.id website: <https://corona.jogjapro.go.id/data-statistik>
- DIY, PEMDA. (2020). Yogyakarta Tanggap Covid-19. Retrieved November 8, 2020, from corona.jogjapro.go.id website: <https://corona.jogjapro.go.id/data->

- statistik
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2), 127. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Fadel, M. (2020). Muhammadiyah Bentuk Lembaga MCCC. Retrieved from metrosulawesi.id website: <https://metrosulawesi.id/2020/04/28/muhammadiyah-bentuk-lembaga-mccc/>
- Fakhrudin, M. (2021). Survei LKSP: Muhammadiyah Paling Peduli Covid-19. Retrieved from [republika.co.id](https://www.republika.co.id) website: <https://www.republika.co.id/berita/qcqcrcr327/survei-lksp-muhammadiyah-paling-peduli-covid19>
- Falahuddin. (2020). Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19. *Maarif*, 15(1), 137–152. <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.81>
- Ichsan, M. (2020). Islamic Philanthropy and Muhammadiyah's Contribution to the Covid-19 Control In Indonesia. *Afkaruna*, 16(1), 114–131. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0116.114-130>
- Irawan Denny. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 5, 1–12.
- Isngadi, & Khakim, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Fikih Kebencanaan Terhadap Perilaku Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Covid-19). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 202. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31470>
- Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 129–146. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25>
- Majid, A. I., Muchin, S., & Sunariyanto. (2021). INTERELATION INSTITUSIONAL COLLABORATION DALAM PENAGGULANGAN BENCANA COVID 19 DI KOTA MALANG (Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 15(1), 64–69.
- Margerum, R. D. (2008). A typology of collaboration efforts in environmental management. *Environmental Management*, 41(4), 487–500. <https://doi.org/10.1007/s00267-008-9067-9>
- Margono, Masithoh, R. F., & Priyo. (2020). Preparedness prevention of Covid-19 Muhammadiyah residents in Magelang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 16(2), 01–10. <https://doi.org/10.26753/jikk.v16i2.492>
- Michael, T. (2020). Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 231–237.
- Mistriani, N., Maria, A. D., & Damayanti, V. (2020). Pentingnya Pelaku Industri Pariwisata Dibekali Uji Kompetensi Lewat Daring untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Indonesia. *Edutourism Journal Of Tourism Research*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.46964/jtr.v2i1.325>
- Mucovid19. (2021). Whatsapp Center.
- Mulyono, D., Elshap, D. S., & Kartika, P. (2018). IMPLIKASI PELATIHAN MITIGASI

- BENCANA TERHADAP KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA GEMPA. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi P2M STKIP Siliwangi*, 5(2), 1–6.
- Musaffak, & Setiawan, A. (2020). Membaca Kritis Sebagai Salah Satu Langkah Antisipasi Misinformasi di Masa Pandemi. *Prosiding Seminar Bahasa Dan Sastra Indonesia*, (4), 454–459.
- Musta, W., Billah, I. N., & Mustofa, M. H. (2018). Peran Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Periode 2016-2018. 58–69.
- Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48–62.
- Ninditya, fransiska. (2021). Wapres ingatkan tiga hal pentingnya keterbukaan informasi publik.
- Nugraheny, D. E. (2020). Masa Darurat Bencana akibat Virus Corona Diperpanjang hingga 29 Mei. Retrieved February 27, 2021, from kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-bencana-akibat-virus-corona-diperpanjang-hingga-29-mei>
- Pitri, T. A. (2017). KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN: PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2016.
- Pratikno, H., & Kurniadi, A. (2020). KOLABORATIF PENGELOLAAN CANDI BOROBUDUR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNG MERAPI. 4(1), 30–39.
- Pribadi, P., Kasetyaningsih, S. W., Julaeha, Nurcahyati, & Fajrin, E. S. (2021). PEMBERIAN PEMAHAMAN TENTANG PEMULASARAN JENAZAH YANG TERKONFIRMASI COVID 19 SESUAI PROTOKOL KESEHATAN. 1, 6.
- Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, S. (2018). Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bandung Barat The Dissemination Model Of Health Communication Information in Rural. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 175–190.
- Safri'ah, A. A. (2020). Kajian Sosiologis Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 213. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2038>
- Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>
- SDG's. (2017). Tujuan SDG's. Retrieved from SDG's website: <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>
- Setiawan, R. (2019). Colaborative Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Dalam Menaggulangi Kebakaran Lahan Di Kota Dumai. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 5(2), 62–68. [https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5\(2\).4677](https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5(2).4677)
- Shalihah, N. F. (2021). Daftar Zona Merah 14 Februari 2021: 44 Zona Merah, Jateng Terbanyak. Retrieved February 26, 2021, from kompas.com website: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/17/150500265/daftar-zona-merah-14-februari-2021-44-zona-merah-jateng-terbanyak?page=all>
- Suarjat, J. (2017). EVALUASI EFEKTIVITAS SATUAN REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN

BENCANA WILAYAH BARAT. 8(1).

- Subekti, P., Hafiar, H., & Bakti, I. (2020). Penggunaan Instagram oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengoptimalkan destination branding Pangandaran. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2), 174. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23545>
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>

Daftar Narasumber

- Endro Sambodo (Informan 1), Kepala Bidang Operasi TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB.
- Purwadi (Informan 2), Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PWM Provinsi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 29 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB

Tentang Penulis

- Vicky Alfitra Perdana** adalah Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ahmad Syafiqurrohman** adalah Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro** adalah Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nita Aribah Hanif** adalah Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhammadi Miftahul Ahsan** adalah Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahmawati Husein** adalah Dosen Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.